

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

Pada BAB I penulis akan menjelaskan bagaimana penelitian akan dibuat, BAB I ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori dan konsep, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB I ini adalah fondasi untuk peneliti dalam menuliskan skripsi yang sudah diteliti.

### **A. Latar belakang**

Pada tahun 1991 Uni Soviet akhirnya pecah menjadi beberapa negara, dan pada tahun yang sama, Pakta Warsawa bubar dan Ukraina memberanikan diri untuk memerdekakan negaranya dari Uni Soviet dalam sebuah referendum yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 1991 yang bertujuan untuk Ukraina melepaskan negaranya dari Uni Soviet. Presiden Uni Soviet pada saat itu Boris Yeltsin menyetujui referendum tersebut yang selanjutnya Rusia, Ukraina dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014 dikarenakan adanya revolusi menentang supremasi Rusia. Revolusi tersebut juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE) yang membuat Presiden Rusia Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan Nato di sebelah perbatasannya. (Oktarianisa, 2022)

Konflik antara Rusia dan Ukraina pun dimulai pada bulan November tahun 2021. Dimana Presiden Putin mengarahkan pasukan militernya di perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Pada bulan Desember di tahun yang sama, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang wilayah Ukraina. Sejumlah pemimpin besar Eropa juga menginisiasi negosiasi antara kedua negara tersebut, antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tetapi Putin tidak mau negara pecahan Uni Soviet tersebut menjadi anggota organisasi NATO. (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION)

Terjadinya krisis di Ukraina tersebut dikarenakan pemimpin Ukraina yang menjabat pada saat itu, yaitu Viktor Yanukovich menunda untuk dilakukannya pembicaraan mengenai kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sehingga menimbulkan reaksi terhadap rakyatnya dan membuntut pada pemecatan presiden Ukraina tersebut oleh rakyatnya. Viktor menganggap jika Ukraina melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dalam bidang perdagangan bebas dengan Uni Eropa, akan mengancam kerja sama antara Ukraina dengan Rusia, hal ini

yang kemudian membuat rakyat Ukraina melakukan demonstrasi yang berakhir pada turunnya presiden Viktor. (Hakim & Sadiyin, 2022)

Krisis politik ini mengakibatkan konflik yang belakangan terjadi di sebuah wilayah yang terletak di semenanjung laut hitam pada wilayah antara Ukraina dengan Rusia yang bernama Krimea. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari Uni Soviet yang kemudian diberikan kepada Ukraina (Republik Sosialis Soviet) pada tahun 1954, oleh pemimpin Rusia pada saat itu yang bernama Nikita Khrushchev. Krimea melepaskan dirinya dari Ukraina dan masuk ke Rusia melalui jalur referendum. Krisis politik dan referendum yang terjadi di Krimea lebih banyak memberikan pengaruh kepada dua wilayah lain di Ukraina bagian timur, lebih tepatnya Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah ini ikut bergejolak dan menuntut digelarnya referendum seperti halnya pada Krimea untuk dapat melepaskan wilayahnya dan masuk kedalam bagian Rusia lagi. (Hakim & Sadiyin, 2022)

Konflik yang melibatkan bukan hanya Rusia dan Ukraina melainkan negara barat lainnya berdampak besar dalam ekonomi global, dimana Rusia adalah produsen dan pengekspor minyak bumi terbesar ketiga di dunia, pengekspor gas bumi terbesar kedua, dan pengekspor batubara terbesar ketiga. Ukraina juga merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia dan pengekspor minyak bunga matahari terbesar kedua. Selain itu, Ukraina mendominasi perdagangan pupuk global dan merupakan eksportir pupuk terbesar. Sedangkan Ukraina adalah salah satu pengekspor hasil pertanian terbesar di dunia. (Ukraine Export Index, 2023) salah satu hasil tani yang di produksi oleh Ukraina adalah gandum, jagung dan bunga matahari. Adapun dampak ekonomi yang disebabkan oleh konflik tersebut antara lain yaitu inflasi, gangguan transportasi internasional, harga bahan pangan yang meningkat dan masalah eksportasi yang dialami berbagai negara di seluruh dunia.

Ukraina memiliki lahan bercocok tanam sebanyak 55% dari keseluruhan wilayah negaranya, oleh karena itu 14% dari total keseluruhan populasinya bekerja sebagai petani, oleh karena itu Ukraina adalah negara dengan ekspor produk agrikultural terbanyak di dunia dengan persentase export agrikultural sebanyak 41% dari keseluruhan export agrikultural di dunia. (Foreign Agricultural Service, 2022). Sedangkan Rusia mengekspor hasil buminya yaitu berupa minyak mentah yang kemudian diolah menjadi bahan bakar. Rusia adalah pengekspor minyak mentah ke-2 di dunia dengan persentase ekspor 8.3% dari total keseluruhan negara yang mengekspor minyak mentah. (Affairs, 2022)

Dampak besar dari konflik ini adalah kenaikan harga barang di semua negara, baik yang bersangkutan dengan konflik maupun yang tidak, seluruh ekonomi global akan merasakan dampak dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Ada dua hal yang berdampak bagi negara lainnya, pertama adalah kenaikan harga di bidang komoditas seperti makanan dan energi. Ke-dua ekonomi antar beberapa negara di sekitar konflik akan terganggu di bidang perdagangan, rantai pasokan serta munculnya gelombang pengungsi di berbagai negara sekitar konflik. Kenaikan harga makanan dan bahan bakar yang lebih tinggi dapat memicu resiko kerusuhan di beberapa kawasan.

Dikutip dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), konflik Rusia dengan Ukraina sangat berpengaruh dalam pemangkasan pertumbuhan ekonomi global. Indef menilai bahwa konflik tersebut menyebabkan adanya pembatasan akses gas dan minyak yang berimbas terjadinya kenaikan harga energi dan pangan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada negara negara yang ikut bercampur tangan dengan konflik tersebut tetapi negara di seluruh dunia mengalami kenaikan harga. Indef juga menyebut bahwa hal tersebut menggerakkan kenaikan harga komoditas, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara, alih alih melakukan promosi ekspor kini banyak negara yang tidak melakukan ekspor sama sekali terkhusus pada produk pangan, restriksi ini dikarenakan setiap negara ingin mengutamakan pemenuhan pasokan domestiknya. Karenanya supply bahan baku impor untuk industri akan langka. Hal tersebut adalah salah satu yang mengakibatkan inflasi pada negara negara di seluruh dunia. (Pratama, 2022)

Pada tahun 2020 menurut catatan Bank Dunia terhadap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengimpor 9.7% pupuk dari Rusia, dan 9.2 persen bahan sereal dari Ukraina. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina itu akan menyebabkan harga energi dan makanan global kemungkinan naik masing-masing sebesar 50 persen dan 20 persen pada tahun 2022. Sedangkan tingkat inflasi untuk ASEAN sebagai sebuah kelompok persatuan antar negara meningkat dari 3,1% pada tahun 2021 menjadi 4.7% pada tahun 2022 (Oktaveri, 2022)

Saat ASEAN pertama kali dibentuk, kerjasama antara ASEAN dengan Rusia tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, kerjasama antara ASEAN dengan Rusia dimulai sejak tahun 1991, dan pada akhirnya hubungan multilateral antara ASEAN dengan Rusia terjalin sejak Rusia resmi menjadi mitra dialog ASEAN yang ke sepuluh pada tahun 1996. Federasi Rusia di masa yang lalu dan di masa yang akan datang mempunyai kepentingan yang besar dalam

bidang politik, ekonomi, militer yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bentuk kerjasama di berbagai bidang dengan ASEAN.

Serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina tentu saja mengganggu ekonomi global yang berkepanjangan, ditambah lagi banyak negara yang baru pulih dari pandemi Covid-19 atau bahkan dalam masa pemulihan. Tetapi hal yang dilakukan Rusia ini menyebabkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan makanan dan energi yang besar. Hal ini berkaitan dengan kontribusi peningkatan harga energi dan pangan sehingga dapat menimbulkan krisis serta konflik internal pada beberapa negara yang berdampak. Dari krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini tentu berimbas terhadap bidang ekonomi, dan tentu saja konflik tersebut menimbulkan restrukturisasi perdagangan internasional. Dikarenakan negara yang terlibat tidak hanya di wilayah tersebut tetapi semua negara di dunia. Meskipun tidak diketahui kapan restrukturisasi terjadi, akan tetapi tentu beberapa negara yang memiliki hubungan dengan Rusia dan Ukraina akan memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan nasional. (Hakim & Sadiyin, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya hubungan perekonomian antar negara di seluruh dunia memiliki pengaruh yang sama atas perang Rusia-Ukraina dikarenakan kedua negara tersebut memproduksi salah satu produk yang sangat berharga bagi masyarakat dari seluruh dunia. Seperti Rusia yang mengekspor produk minyak yang diolah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk transportasi, dan Ukraina yang menghasilkan produk agrikulturalnya seperti jagung, gandum dan biji bunga matahari yang kemudian diolah menjadi produk pangan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan mengurangnya kedua bahan primer tersebut dapat menjadikan suatu negara mengalami krisis di negaranya, yang akan mengakibatkan konflik internal, seperti adanya demo dan pengeluaran pemerintah bertambah. Kedua negara tersebut juga mengekspor hasil buminya seperti bijih besi serta produk besi jadi lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap semua negara di dunia yang salah satunya di kawasan Asia Tenggara. Diketahui Asia Tenggara menjadi kawasan yang sangat bergantung terhadap Rusia dalam komoditas minyak bumi. selain itu, letak geografis yang terbilang dekat dibandingkan dengan kawasan Amerika Serikat, dikarenakan biaya yang dibutuhkan lebih mahal untuk mengekspor ke wilayah AS dibandingkan wilayah Asia Tenggara.

Disamping itu hubungan perekonomian dan militer Rusia di kawasan Asia Tenggara memiliki keterikatan dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Indonesia dan Thailand. Berdasarkan hubungan ekonomi yang terjalin antara Vietnam dan Rusia

mendapatkan total perekonomian lebih dari 2% PDB. Selain itu, Indonesia dan Thailand memiliki total perdagangan sekitar 1% PDB. ketiga Negara tersebut memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat. Selain itu, Vietnam, Indonesia dan Thailand juga menjadi negara yang memiliki hubungan militer yang cukup dekat seperti pembelian alutsista dan lain sebagainya. (Hakim & Sadiyin, 2022)

Berbagai negara pun menginginkan konflik yang terjadi ini diselesaikan, banyak negara yang melakukan dialog serta dengan cara mediasi seperti yang dilakukan negara Indonesia pada pertemuan G20 pada tahun 2022 kemarin. Pada pertemuan antar negara anggota G-20 ini banyak negara negara yang terlibat dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. seperti Rusia itu sendiri, Amerika Serikat dan beberapa negara adidaya dan negara kawasan Uni Eropa dengan alih-alih menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut. Banyak juga negara yang menyelesaikan permasalahan ekonomi yang disebabkan dari konflik tersebut, cara tersebut pun bermacam macam, seperti melakukan hubungan bilateral atau multilateral antara negara yang berdampak terkhusus negara berkembang. Dengan kenaikan harga komoditas ini dapat memicu pemberontakan terlebih di negara kawasan Afrika dikarenakan banyaknya wilayah di kawasan tersebut yang kekurangan bahan pangan untuk kebutuhan sehari hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, deskripsi rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai **“Bagaimana Strategi ASEAN Dalam Menangani Dampak Ekonomi Akibat Krisis Konflik Rusia-Ukraina?”**

## **C. Kerangka Teori dan konsep dalam penelitian**

Untuk membantu menjelaskan permasalahan yang ada serta merumuskan masalah yang terjadi, penulis akan menggunakan Konsep Kerja Sama Internasional dan Teori Kebijakan Luar Negeri.

### **1. Teori Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri dalam bahasa inggrisnya adalah *foreign policy* merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh K.J Holsti. Dalam teorinya, kebijakan luar negeri merupakan suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan dalam suatu wilayah. Adanya perbedaan-perbedaan tujuan maupun perbedaan kebijakan setiap negara, dengan adanya kebijakan luar negeri setiap negara harus menyamakan dan memiliki

kesepahaman dalam melakukan kerjasama, hal ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan kolektif. K.J Holsti juga mendefinisikan kebijakan luar negeri ini sebagai studi tentang “tindakan suatu negara” terhadap lingkungan eksternal dan sering juga pada lingkungan domestik, di mana tindakan-tindakan tersebut dirumuskan. Oleh karena itu, Holsi menaruh perhatian pada tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dan setiap studi yang didasarkan pada interaksi dua negara atau lebih dikonseptualisasikan, dalam perspektif terminologi Holsti sebagai Politik Internasional yang didefinisikan sebagai aspek hubungan luar negeri suatu negara yang disponsori pemerintah. (Holsti, 1967)

Secara umum, kebijakan luar negeri mencakup tindakan dalam bidang ekonomi, politik, dan militer yang disesuaikan dengan kepentingan negara, menurut buku yang ditulis oleh K.J. Holsti dengan judul *International Politics: A Framework For Analysis* (Holsti, 1967) terdapat beberapa tujuan utama dari penerapan kebijakan luar negeri, diantaranya:

- Keamanan (*Security*). Hampir semua negara pasti menghadapi masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional. Karenanya, ada kebijakan internasional terbilang sangat penting demi memperkuat keamanan dan kedaulatan sebuah negara.
- Kesejahteraan, adanya kebijakan luar negeri juga memiliki tujuan agar kesejahteraan warga dari suatu negara tercapai. Negara akan memberlakukan kebijakan luar negeri biasanya pada aspek ekonomi agar dapat mengatasi berbagai masalah domestik pada bidang ekonomi. Dalam bukunya dicontohkan seperti tukar-menukar sumber daya antar negara yang berhubungan, serta kebijakan ekonomi lainnya.
- Otonomi, kebijakan luar negeri sebagai bentuk otonomi merujuk pada kemampuan pemerintah untuk merancang dan mengambil keputusan terkait berbagai urusan domestik dan luar negeri sesuai dengan prioritas atau kepentingan negara tersebut.
- Status negara. Kebijakan luar negeri sangatlah penting bagi status sebuah negara. Status ini harus dimiliki negara agar dapat mendapat rasa hormat dari negara lain. seperti ketika negara memiliki kebijakan dalam bidang kemiliteran, tentu akan ada statusnya tersendiri.

Dari tujuan kebijakan luar negeri dari K.J. Holsti ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dalam konteks luar negeri, tapi kebijakan ini sangat dipengaruhi dan mempengaruhi kondisi domestik suatu negara.

Banyak peneliti berpengaruh yang setuju akan definisi Kebijakan Luar Negeri yang dinyatakan oleh K.J Holsti, ia adalah landasan dari teori ini serta pengemuka dalam teori tersebut. Seperti Fred Sondermann selaku guru besar di Kampus Colorado, Fred menyetujui definisi dari Kebijakan Luar Negeri yang diterapkan oleh K.J.Holsti pada buku yang diterbitkan oleh K.J.Holsti pada tahun 1967 tersebut. menurut Fred, pengertian Kebijakan Luar Negeri adalah suatu studi tentang “aktivitas individu dan kelompok di dalam suatu negara yang melibatkan pemerintahan suatu negara, yang dirancang untuk mempunyai dampak terhadap kebijakan negara lain, atau pada individu dan kelompok di dalamnya”. Joseph Frankel selaku profesor sosial politik pun menanggapi pengertian yang dikatakan oleh K.J.Holsti, dia juga menyetujui definisi Kebijakan Luar Negeri sebagai “keputusan dan tindakan yang melibatkan sejumlah orang tertentu yang melibatkan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. (Dawisha, 1976)

Kebijakan luar negeri adalah salah satu cara yang dilakukan suatu negara, dibuatnya kebijakan luar negeri ini memiliki tujuan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan suatu negara maupun kepentingan kolektif. Diberlakukannya kebijakan luar negeri ini juga salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan oleh suatu negara atau beberapa negara yang menyetujui kebijakan yang sudah diberlakukan dan untuk mempengaruhi negara lain, untuk menjalin hubungan antar negara dan menjaga keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri terdapat beberapa rumusan yang menjadi tujuan dari adanya suatu negara untuk membentuk maupun melakukan kebijakan luar negeri, (Amari, 2019) diantaranya;

1. Unsur Waktu, dalam aspek waktu, diberlakukannya kebijakan luar negeri ini memiliki waktu yang targetnya harus terpenuhi dalam melakukan pencapaian tujuan.
2. Nilai, pada tujuan suatu negara merupakan salah satu faktor terpenting dari dorongan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada tujuan suatu negara.

3. Jenis tuntutan tujuan, merupakan salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan.
4. Dalam kapabilitasnya merancang maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara memiliki dasar serta rangkaian-rangkaian asumsi maupun tujuan-tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional. Sedangkan komponen yang dipakai dalam kebijakan luar negeri adalah adanya pandangan sikap yang dilakukan atau dimiliki oleh negara lain, keputusan-keputusan dan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai.

Setiap negara mempunyai kepentingan dan kebutuhan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, stabilitas keamanan dan kepentingan elit politik. Setiap negara bebas menentukan arah kebijakannya berdasarkan tujuan dan orientasi yang diinginkan, namun setiap negara juga perlu menyadari bahwa kepentingan negara lain juga harus dihormati agar tidak terjadi campur tangan. atau faktor pemicu. gangguan stabilitas keamanan. (Amari, 2019) Kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan melakukan peperangan, kerjasama ekonomi dan perdamaian. Dari adanya ketiga cara tersebut ASEAN dan Indonesia memilih untuk melakukan upaya kerjasama ekonomi dan perdamaian. Hal ini dikarenakan ASEAN memiliki tujuan dan kepentingan dalam pola kebijakan yang dilakukan, hal yang dilakukan negara kawasan Asia Tenggara ini dilakukan untuk menjaga perdamaian antar negara, bahkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.

Dengan adanya perebutan wilayah antara Rusia dengan Ukraina banyak negara yang memilih kepihakan antara kedua negara tersebut, seperti contoh jika salah satu negara berpihak pada Rusia, negara yang mendukung Ukraina akan menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut, sanksi ini ada beberapa macam seperti ditolaknya kedatangan serta dibuatnya kebijakan baru yang merugikan negara yang berpihak lain.

Seperti di ASEAN, pertemuan oleh Uni Eropa dengan ASEAN pada tahun 2022 yang membahas kerja sama ekonomi yang lebih mendalam, tetapi ajang itu tidak membuahkan kesepakatan bersama untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina, Pernyataan UE-ASEAN tentang invasi tersebut hanya mengatakan “sebagian besar anggota” mengutuk keras perang di Ukraina karena menghormati kedaulatan, kemerdekaan politik dan integritas wilayah Ukraina. Pada sisi lain, Vietnam dan Laos yang memiliki hubungan militer baik dengan Rusia tetap tidak ingin berpihak kepada Ukraina. (Sikap ASEAN Terpecah soal Perang Rusia di Ukraina, 2022)

melihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua negara berpihak pada satu negara yang berkonflik, banyak sanksi yang dijatuhkan kepada negara lain karena memilih untuk berpihak pada salah satu negara. Bahkan anggota dari suatu asosiasi negara asia tenggara yang bersifat besar terjadi keretakan dalam memilih pihak. Seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan lainnya yang memilih untuk berpihak terhadap Ukraina dikarenakan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, tetapi Myanmar dikarenakan adanya bantuan dari Rusia pada saat melakukan kudeta pada tahun 2021 kemarin maka pemerintah Myanmar sekarang pro-Rusia.

Singkatnya, kebijakan luar negeri merupakan serangkaian komponen yang dapat menjadi pedoman bagi negara dalam berinteraksi dengan negara lain atau dengan aktor non-negara dalam lingkungan internasional. Dalam melakukannya, hal ini harus selalu dipantau dan dievaluasi untuk memaksimalkan manfaat kerjasama multilateral.

Adapun konsep yang dilandaskan dalam penulisan penelitian untuk memperkuat teori yang dipilih oleh penulis dalam menyelesaikan permasalahan dari penelitian ini adalah:

## 2. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama tercipta sebagai akibat dari penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara-negara lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional meliputi kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan, yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. (Bagaskara, 2018)

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang akan kekurangan institusi-institusi dan norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya informasi mengenai motif dan tujuan berbagai pihak. Interaksi tersebut bersifat berkesinambungan, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara berupa pertukaran informasi tentang tujuan

kerjasama dan berkembangnya berbagai organisasi walaupun tidak sempurna, dimana model kerjasama menggambarkan unsur-unsur teori kerjasama berdasarkan kepentingan pribadi dalam sistem internasional. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997)

“Kerja sama dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan diperbolehkan oleh undang-undang, seperti dalam organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor negara menjalin hubungan kerja sama melalui organisasi internasional dan mekanisme internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan, regulasi, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang ditetapkan secara terpadu, di mana harapan para aktor dan kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.”  
(Dougherty & Pfaltzgraff, 1997)

Secara teori kerjasama internasional meliputi hubungan antar dua atau lebih dari negara serta hubungan antara unit-unit yang lebih besar. Hal ini dapat disebut kerjasama internasional tetapi jika ada lebih dari dua aktor negara maka dapat disebutkan juga sebagai multilateralisme. John Ruggie selaku akademisi mendefinisikan multilateralisme sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum terjadi, yakni keteraturan internasional. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997, p. 420)

Umumnya kerjasama internasional ini terbagi menjadi tiga, yaitu kerjasama bilateral, regional dan multilateral. (Salim, 2023) Berikut adalah pengertian dari ketiga jenis kerjasama internasional yang dilakukan suatu negara:

- Kerjasama bilateral. Jenis kerjasama ini adalah kerjasama yang hanya dilakukan oleh dua negara dan tidak lebih. Biasanya didasari oleh hubungan kedua negara tersebut yang baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Kerjasama bilateral biasanya diwujudkan dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan hingga kebudayaan.
- Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah suatu bentuk kerjasama antar negara di mana negara-negara yang terlibat masih dalam satu kawasan atau wilayah yang terbelang dekat. Seperti contohnya ASEAN yang dibentuk oleh negara kawasan Asia Tenggara dan Uni Eropa yang

dibentuk oleh negara kawasan benua Eropa. Dilakukannya kerjasama regional ini dikarenakan negara anggota memiliki satu tujuan yang sama dan ingin memiliki hubungan yang sangat baik terhadap negara di sekitarnya. Biasanya kerjasama regional ini dibentuk pada sektor pertahanan, politik dan ekonomi.

- Kerjasama multilateral. Jenis kerjasama ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak ada batasan pada status serta jangkauan wilayah negara yang ingin melakukan kerjasama tersebut. Seperti contoh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Anggota PBB ini tidak hanya di kawasan Asia atau Eropa ataupun wilayah negara barat, tetapi semua negara di dunia dapat bergabung kepada organisasi internasional tersebut dengan kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff alasan negara melakukan kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional lain memiliki beberapa alasan, berikut adalah alasan mengapa hubungan kerjasama internasional dapat terjadi:

1. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
2. Karena adanya masalah-masalah yang timbul dalam keamanan salah satu negara atau negara yang sedang bekerja sama.
3. Adanya alasan demi meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, banyak negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Dikarenakan ingin mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Pandangan K.J Holsti dalam kerjasama internasional lebih menilai kepada kepentingan atau tujuan saling bertemu yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. K.J. Holsti juga berharap suatu negara akan kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Kerjasama internasional ini harus disepakati oleh kedua atau lebih negara, tidak hanya dalam satu pihak saja dengan

keputusan dan kepentingan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di salah satu pihak negara tersebut. (Holsti, 1967)

Kerja sama antara negara dan non-negara, dalam hal ini lembaga atau organisasi internasional, mulai muncul karena negara dan organisasi saling membutuhkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya lembaga atau organisasi tersebut, biaya dapat dikurangi. dan memberikan layanan. informasi kerjasama. (Keohane & Axelrod, 1985) keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (mutualitas) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat serta bayangan terhadap masa depan (*Shadow of the future*). Tujuan lainnya dari terbentuknya kerjasama antar suatu negara menurut (Salim, 2023) yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjalinkan hubungan kerjasama internasional dapat mempererat hubungan persahabatan antar negara yang melakukan kerjasama tersebut. hal ini dapat menghindari permusuhan antar negara-negara yang mengikuti kerjasama karena pada umumnya negara yang menjalin hubungan dengan negara lainnya memiliki satu tujuan yang sama dan ingin tujuan tersebut tercapai.
- 2) Kerjasama antar negara ini dapat menciptakan perdamaian dunia, dikarenakan negara yang menjalin hubungan lebih sedikit rentan akan adanya kekerasan dan peperangan antar negara yang dapat terjadi. Kerjasama ini bertujuan agar semua negara di seluruh dunia dapat mencapai perdamaian.
- 3) Dampak ekonomi pun tidak dilupakan. Biasanya kedua negara menjalin kerjasama internasional untuk menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dengan adanya kerjasama internasional, negara di dunia akan maju secara merata dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi, ekonomi dan masih banyak lainnya.
- 4) Terjalinnnya hubungan internasional dapat memenuhi kebutuhan negara. Salah satu tujuan yang terpenting dalam kerjasama internasional adalah guna melengkapi kebutuhan suatu negara. Seperti contoh tiap negara mempunyai krisis iklim serta keadaan alam yang berbeda-beda. Hal ini termasuk kondisi geografis pada suatu negara, yang akan mengakibatkan kebutuhan dan pemasokan pada setiap negara berbeda.

Manfaat yang muncul dari dilakukannya hubungan internasional ini dapat terbilang banyak tidak hanya dari bidang ekonomi dan bidang pertahanan tetapi dalam bidang

lainnya. Seperti dalam bidang ideologi yang dapat memunculkan rasa saling menghormati meski memiliki perbedaan. Dalam bidang politik dapat membuat negara saling berorientasi pada kepentingan nasionalnya. Pada bidang sosial budaya negara dapat saling melengkapi satu sama lain Akan tetapi, tetap berpedoman pada kepribadian yang sudah dimiliki oleh masing-masing negara. Dalam bidang pendidikan dapat dilakukan pertukaran pelajar antar negara agar siswa/mahasiswa dapat menimba ilmu serta bertukar sosial budaya yang pada nantinya akan membawa dampak positif bagi negara. (Salim, 2023)

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah serta kerangka teoritik yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengajukan hipotesa terkait cara dan strategi ASEAN dalam menangani dampak ekonomi akibat krisis konflik Rusia-Ukraina dengan cara:

1. Dilakukannya hubungan bilateral negara ASEAN dalam menangani ancaman inflasi di negaranya dan saling membantu antar satu dengan lainnya.
2. ASEAN menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lainnya di luar kawasan Asia Tenggara agar membantu pemasukan produk yang terancam krisis dalam negaranya. Serta cara yang dilakukan dalam menengahi konflik.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan metode ini penulis akan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik dalam pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis kemudian disertai dengan sebuah Analisa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan melalui *academic literature*, laporan resmi pemerintah, jurnal, artikel dan media online seperti situs-situs internet yang bersifat kredibel dan relevan. Seluruh pengumpulan data ini memiliki topik atau latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan menjadi lima bab, dengan bab dan topik pembahasan sebagai berikut:

- **BAB I** BAB ini berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, hipotesa, sistematika penulisan serta teori dan konsep yang dipakai dalam penelitian.
- **BAB II** memuat pembahasan awal mula serta dinamika konflik yang terjadi pada Ukraina dan Rusia, pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana konflik tersebut bisa terjadi, serta gambaran umum yang terjadi dan akibat yang dirasakan oleh negara negara lain di dunia.
- **BAB III** memuat pembahasan tentang bagaimana negara anggota ASEAN menjalani hubungan diplomatik dengan negara lain pada saat terjadi konflik, cara apa saja yang dilakukan untuk menghindari inflasi, serta responsi ASEAN terhadap konflik tersebut.
- **BAB IV** memuat analisa upaya Indonesia dalam melakukan hubungan multilateral dengan negara anggota ASEAN serta cara yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi inflasi di negaranya.
- **BAB V** Penutupan  
Penulis akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan penelitian yang sudah disusun oleh penulis.